**BAB IV**

**ANALISIS DATA POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD (STUDI TERHADAP FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DI KAB. OKI)**

1. **Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar**

Fenomena komunikasi politik di Indonesia mengalami perubahan yang cepat beberapa tahun terahir ini. Reformasi bisa jadi merupakan pintu gerbang yang membawa perubahan dalam sistem, pola pikir, maupun prilaku kehidupan sosial dan politik bagi masyarakat di Indonesia. Era yang berawal pada 1998 dan terus berlangsung hingga saat ini, secara langsung ikut memberi dampak bagi perkembangan sistem komunikasi media massa yang ada di Indonesia. Salah satu indikator perubahan dalam konteks media adalah menjamurnya kader-kader dari berbagai partai politik beragam disertai sistem pengelolaan yang lebih independen dari masa sebelumnya.[[1]](#footnote-1)

Hal serupa pun terjadi pada lapangan yang penulis teliti, ada ruang fenomenalogi yang seakan tergambar dan menarik untuk dibahas dalam pola komonikasi politik anggota DPRD Kab. OKI. Adanya ruang fraksi seperti menambah kewajaran dalam komunikasi politik yang terjadi antara satu fraksi dengan fraksi lainya.

Pada era kepemimpinan anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya saat ini sebuah komunikasi politik sangat erat diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat sebuah kekuatan politik yang dibangun dari berbagai kalangan pendukung dan kader partai Golongan Karya sendiri, sehingga dengan adanya komunikasi politik tersebut. Maka kekuatan komunikasi politik yang dimiliki oleh fraksi ini menjadi kuat untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Ada berbagai macam komunikasi politik yang dilakukan oleh fraksi partai Golongan Karya seperti :

1. Komunikasi politik dalam memperkuat koalisi yang mendukung pemerintahan (Partai Politik).
2. Komunikasi politik terhadap lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, menteri-menteri, dan para pejabar pemerintahan untuk dapat mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang akan menjadi salah satu tujuan pemerintahan Anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya agar tidak terjadi hambatan dalam penerbitan kebijakan tersebut.
3. Komunikasi politik yang dilakukan untuk terus memperkuat diri dalam menjalankan pemerintahannya agar tidak ada hambatan yang diakibatkan oleh komunikasi politik yang kurang baik dan bertentangan.

Senada dengan yang disampaikan oleh Sudrono Asnawi, “ada beberapa pendapat mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif , perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan”.[[2]](#footnote-2)

Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik. Mengenai  komunikasi politik ini *(political communication)* Kantaprawira dalam Heru Budianto memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.[[3]](#footnote-3)

Sedangkan pandangan mengenai pengertian pola komunikasi poltik adalah seperti apa yang disampikan oleh bpk Nawawi : “ saya mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut beliau menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.[[4]](#footnote-4)

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan *(policy)* harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Menurut Gipp sebagaimana dikutip oleh Tjun Surjaman : “Komunikasi adalah proses seseorang mempengaruhi orang lain dan karena itu sangat penting bagi kepemimpinan”.[[5]](#footnote-5) Maka jika ditelaah komunikasi politik kepemimpinan Anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya tidak begitu efektif karena 50 persen dari kebijakannya tidak terealisasikan dengan baik, itu membuktikan tidak mampu mempengaruhi parisipan politik kabinetnya dengan baik. Padahal kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam dunia komunikasi politik sangatlah penting apa lagi bersangkutan dengan kepentingan negara.

Berpijak dari empat pola komunikasi yaitu vertikal, horizontal, formal dan informal ada fenomenalogi yang menarik untuk diteliti. Seakan ada sesuatu yang membatasi antara satu pola dan pola yang lainya dan ada keadaan yang berbeda ketika terjadi interaksi pola komunikasi vertikal ataupun pola komunikasi yang lainya. Misalnya pola komunikasi vertikal yakni dari pimpinan kepada yang dipimpin, sedangkan dalam keanggotaannya sendiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari orang-orang yang tentu saja berbeda latar belakang partai yang mengusung mereka. Apa lagi saat ini fraksi yang paling banyak mendapat kursi di kenggotaan DPRD secara mutlak dan sendirinya anggota dari faraksi yang paling banyak mendapat kursilah yang menjadi ketua.

Sedangkan menurut Nawawi Anang, mengatakan “Begitu juga ketika terjadi pola komunikasi horizontal ada dua kemungkinan yang biasanya terjadi : individu dan individu ataupun kelompok satu dan kelompok yang lainya, komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal) serta komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalu-jalur organisasi).[[6]](#footnote-6)

Suasana pola-pola di atas dibuat semakin menarik ketika ada faktor internal maupun eksternal juga media yang terkadang memvariasikan dan membumbui terjadinya pola-pola komunikasi di atas. Misalnya kepiawaan media memberitakn suatu agenda kerja dari salah satu anggota DPRD yang terkadang sesuatu yang tidak menarik di buat semenarik mungkin dan terkadang malah sebaliknya.

Dilihat dari tujuan politik *“an sich”,* maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu  dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.[[7]](#footnote-7)

Lasswell memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, “Bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.”[[8]](#footnote-8)

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang komunikasi politik tentunya harus tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah Proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, dengan cara menggunakan media sebagai kemasan informasi atau melalui transmisi secara simbolik, sehingga informasi mudah difahami dan pada akhirnya mereka saling memiliki kesamaan persepsi. Komunikasi memiliki komponen dasar di dalamnya. Komponen dasar tersebut ialah :

1. Komunikator/pengirim

2. Pesan

3. Media

4. Komunikan/Penerima

5. Interaksi

6. Pemahaman

Dari sekian komponen tersebut jika melakukan kerja maka akan membentuk proses komunikasi yang saling berkaitan dan timbal balik.Setelah mengetahui tentang penjelasan terhadap komunikasi maka untuk selanjutnya akan dijelaskan masalah pengertian dari komunikasi politik. Banyak sekali para ahli menyampaikan pendapat tentang definisi komunikasi politik.

Tetapi pada dasarnya inti dari pernyataan para ahli adalah sama. Seorang ahli Michael Rush dan Phillip Althoff dalam Anwar Hus menjelaskan “komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.[[9]](#footnote-9)

Menurut Almond dan Powell: “Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (basic function of the system) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun akibat. Semua proses sosialisasi misalnya, merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus selalu menghasilkan perubahan sikap *(attitude change).”*

1. **Pola-pola Komunikasi Politik**
   1. Pola komunikasi vertikal (*top down*, dari pemimpin kepada yang dipimpin)

Menurut Sudrono Asnawi mengatakan : “suasana komunikasi antara pimpinan dan yang dipimpin yang terjadi di DPRD Kab. OKI selama masih dalam urusan dinas dan kepentingan kerja selalu di dahulukan dan menjadi suatu arena komunikasi yang menjadi prioritas kerja. Begitulah yang terjadi di PDRD Kab. Ogan Kemering ilir.

Dari apa yang disampaikan oleh bpk Sudrono Asnawai dapat diambil kesimpulan bahwasanya komunikasi tetap terjalin dengan baik antara pemimpin dan yang dipimpin selama masih dalam urusan kerja ataupun urusan dinas.

Sedangkan menurut bpk Mohd. Rasyid Oemar menjelaskan bahwasanya pola komunikasi politik antara pimpinan dan apa yang pimpin adalah “ yang pertama dari anggota fraksi kepada ketua fraksi, kita selalu menjadi solidaritas dalam tugas sehingga komunikasi politik yang terjadi sangat menguntungkan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara yang memimpin dan dan yang di pimpin memudahkan konfirmasi perkembangan tugas yang ada, baik tugas yang ringan maupun tugas yang di anggap memerlukan pemecahan secara bersama-sama, efeknya tentu saja pada hasil kerja yang tidak lain dan tidak bukan adalah kerja yang optimal yang menghasilkan hasil yang optimal pula. [[10]](#footnote-10)

Dari apa yang di jelaskan oleh bpk Mohd. Rasyid Oemar dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya komunikasi antara ketua fraksi dan anggota fraksi apabila berjalan dengan baik sangatlah menguntungkan. Mulai dari tugas yang rinagan ataupun yang berat dapat di kondisikan apabila komnikasi berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan demikianlah yang terjadi pada anggota DPRD Kab. OKI Fraksi Partai Golongan Karya.

Meski tugas menetralisisr antara satu fraksi dan fraksi yang lainya namun dari keterangan yang disampaikan bpk Mohd. Rasyid Oemar menunjukkan bahwasanya solidaritas dalam kerjalah yang menjadi kunci kesuksesan fraksi ini, meski masih banyak hal yang harus di evaluasi lagi demi terciptanya suasana kerja yang lebih efektif dan efisien.

* 1. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok)

Yang dimaksud pola komunikasi antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok dalam penelitian ini bagaimana baik sesama anggota fraksi ataupun atauupun antar fraksi yang ada muncul komunikasi yang baik dan mendukung satu sama lainnya. Seperti apa yang di sampaikan oleh bpk Nawawi :”Komunikasi yang terjadi antara sesama anggota fraksi merupakan elemen penting yang tentu saja menunjang pencapaian kegiatan kerja yang sudah di targetkan. Fenomena yang terjadi di fraksi partai Golongan Karya komunikasi antar sesama anggota fraksi berjalan dengan baik sehingga mendukung kegiatan yang sudah di agendakan. Sedangkan untuk komunikasi antar fraksi yang terjadi di DPRD Kab. OKI adalah muncul situasi kerja yang harmonis yang tentu saja menggambarkan komunikasi poltik yang baik pula meski dalam catatan masih menjaga wilayah kerja dan komunikasi yang sewajarnya saja dan masih menjunjung rasa saling menghormati demi keharmonisan antar fraksi yang ada.[[11]](#footnote-11)

Dari apa yang disampaikan oleh bpk Nawawi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komunikasi politik antar individu ataupun antar kelompok sudah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya komfirmasi antar anggota fraksi maupun sesama fraksi yang ada. Meski dalam catatan masih saling menjaga dan dalam koridor kewajaran.

Sedangkan bpk Sudrono Asnawi berpendapat mengenai pola komunikasi antara individu ataupun kelompok : “Untuk di fraksi kita kemungkinan untuk adanya miskomunikasi sangatlah kecil dalam praktek komunikasi politik, meski celah tetap ada namun ketika kita mengadakan evaluasi secara bersama. Namun jika komunikasi antar kelompok fraksi itu yang kadang-kadang kurang terorganisir yang terkadang berpengaruh pada kinerja kita juga, adanya anggota dari fraksi satu ke fraksi lain yang masih berpikir pragmatis membuat komunikasi politik kita mengalami penyendatan. Di harapkan agar semua anggota DPRD yang ada sebisa mungkin untuk membuka diri agar kinerja yang menjadi target kita dapat di capai dengan maksimal sesuai dengan target kita.[[12]](#footnote-12)

Dari apa yang di jelaskan oleh bpk Sodrono Asnawi, S. Sos dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang masih menjadi kendala adalah masih ada di antara Anggota DPRD Kab. OKI yang berpikir pragmatis dalam berkomunikasi politik antar fraksi yang ada.

* 1. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal)

Seperti apa yang di sampaikan oleh bpk H. Mohd. Rasyid Oemar adalah “ yang terjadi pada anggota DPRD Kab. OKI adalah komunikasi yang di jalankan berdasarkan jalur formal apa yang sedang di jalankan. Berorientasi pada apa yang menjadi kebutuhan. Seandainya di pandang perlu maka kominikasi politik menlalui jalum pada bidang jalur organisasi formal. Pada hal ini banyak fenomena politik yang terkadang menjadi warna sendiri. Misalkan saja sesama anggota fraksi partai Golongan Karya saja yang berjalan baik.[[13]](#footnote-13)

Dari apa yang di sampaikan oleh bpk Mohd. Rasyid Oemar adalah komunikasi formal yang di jalankan sesuai dengan kebutuhan dan apa saja yang di anggap penting. Misalkan saja dalam ruanglingkup fraksi anggota Partai Golongan Karya.

* 1. Pola komunikasi informal ( komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).

Pola komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka dan tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi adalah seperti apa yang di sampaikan oleh bpk Sudrono Asnawi: “ dalam proses pertemuan tatap muka yang tidak mengikuti prosedur ataupun tidak mengikuti jalur organisasi pola lomunikasi politik yang terjadi adalah pola saling menjaga komunikasi dan saling menghormati dan dengan catatan masih menjaga rahasia masing-masing.[[14]](#footnote-14)

Dari apa yang di sampaikan bpk Sodrono Asnawi dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi di jalankan dengan baik meski masih dengan catatan saling menghormati dan menjaga rahasia masing-masing.

Menurut Agus Hasan mengatakan “fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah the governmental political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.[[15]](#footnote-15)

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komuniksi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi bisa dikatakan komunikasi yang politik yang dilakukan anggota DPRD frkasi partai Golkar adalah komunikasi politik yang menggunakan metode verbal yang tentu saja akan ada pertentangan dari lawan politik yang ada.

1. **Media**

Metode komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya yang sering kali terjadi menurut pakar komunikasi politik yang membangkitkan ketakutan cara-cara komunikasi yang dapat menimbulkan ketakutan terbukti tidak akan berhasil dan tidak efektif kepada publik.

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Politik DPD Partai Golongan Karya Kab. OKI**

Kondisi lingkungan secara tidak langsung membantu manajemen untuk mengindentifikasi langkah apa yang akan ditempuh untuk menjalankan strategi di sebuah lembaga pemerintahan. Secara garis besar sebuah lembaga akan dipengaruhi oleh lingkungan dimana lingkungan tersebut dapat dibagi kedalam dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan internal sebagaimana dinyatakan oleh IU mengatakan bahwa”Tantangan kami sebagai wakil rakyat khususnya didunie perkomunikasian politik banyak sekali baik itu internal maupun eksternal“.[[16]](#footnote-16)

Adapun dari observasi peneliti menemukan beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pola komunikasi tersebut diantaranya : [[17]](#footnote-17)

1. Faktor Eksternal :
2. Latar Belakang Pendidikan

Pola komunikasi memang cukup banyak pegawai yang pendidikan rendah namun bukan berarti mereka tidak mampu dalam mengelolah lembaga sebagaimana di jelaskan oleh HW mengatakan “Bahwa itu tidak jadi persoalan karena menurut saya setiap alumni yang mengabdi di Partai ini ini tidak kalah saingan dengan kader yang pendidikannya lebih tinggi maksudnya mereka adalah orang-orang pilihan yang bisa di terima mengabdi di Partai ini”.[[18]](#footnote-18)

Jadi menurut bapak T, H dan L pendidikan yang rendah tidak menjadi persoalan selagi mereka mempunyai kelebihan yang dapat mereka andalkan.

Kesimpulannya bahwa hal ini memang bisa mempengaruhi manajemen personalia melihat tingkat pendidikan yang rendah akan memicu kurangnya pengalaman dalam berorganisasi akan tetapi dapat memberikan dampak positif jika ia memiliki pengalaman yang lama dalam bidang mengajar serta mempunyai kelebihan yang dapat mereka andalkan walaupun pendidikannya rendah.

Kalau dilihat dari material, ekonomi juga termasuk faktor yang mempengaruhi manajemen pola komunikasi ini rata-rata mereka mempunyai tanggungan keluarga serta kebutuhan individu sedangkan setiap individu yang bekerja disini akan menerima gaji atau imbalan berbeda-beda sesuai dengan kinerjanya. walaupun mereka sejahtera dari non materialnya sebagaimana dinyatakan oleh bapak JS ”Bahwa mengenai kompensasi yakni kalau keadaan cukup memuaskan tapi kalau hanya mengandalkan keadaan tanpa ada usaha lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak akan bisa apalagi saya sudah berkeluarga, adapun selama mengajar disini mungkin cukup banyak yang saya dapat khususnya pengtahuan ilmu agama yang insyallah sudah saya terapkan di masyarakat”.[[19]](#footnote-19)

Dari penjelasan bapak JS tadi dapat simpulkan bahwa ia sejahtera dari segi non material akan tetapi dari segi materialnya ia belum begitu sempurna karena peneliti melihat bahwa bapak JS mempunyai tanggungan keluarga serta kebutuhannya sendiri yang harus di penuhi.

1. Teknologi

Teknolgi berasal dari kata yunani techno yang artinya keterampilan atau seni. Dan kata inilah diturunkan kata teknik dan teknologi. Teknik artinya cara atau metode untuk mmperoleh keterampilan dalam bidang tertentu, sedangkan teknologi adalah pemanfaatan ilmu untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengerahkan semua alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yanga ada.[[20]](#footnote-20)

Manusia yang kreatif mampu mengahadapi tantangan baru dan mampu mengantisispasi perkembangan IPTEK. Kemampuan yang dimiliki oleh orang yang kreatif antara lain adalah: kemandirian, mengembangkan kreativitas disertai keberanian dan sikap bertanggung jawab sebagai realisasi dari sikap mandiri.[[21]](#footnote-21)

Kesimpulanya kemajuan teknologi sangat mempengaruhi produktifitas di fraksi ini, karena personalia harus bisa memahami teknologi khususnya komputer sedangkan penerapan teknologi harus berorientasi mempertahankan produktivitas, hal inilah yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi.

1. Faktor Internal:
2. Motivasi

Fungsi motivasi ( penggerakan), yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan pelatihan. Sehubungan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, sehingga terjadi peningkatan kegiatan personal, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan program yang sudah direncanakan.[[22]](#footnote-22)

Setiap aktivitas manusia pada dasarnya dilandasi oleh adanya dorongan untuk mencapai tujuan atau terpenuhinnya. Adanya daya dorong ini disebut “ Motivasi”. Dalam beberapa terminologi, motivasi dinyatakansebagai suatu kebutuhan, keinginan, gerak hati, naluri dan dorongan yaitu sesuatu yang memaksa organism manusia untuk berbuat atau bertindak.[[23]](#footnote-23)

Untuk menjadikan anggotanya yang dinamis serta memiliki kemampuan berpikir dan motivasi kerja, Ketua Fraksi harus mampu meningkatkan motivasi yang ada pada diri mereka, dengan begitu produktivitas kerja akan meningkat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak H ” Kami juga terkadan saling nilai dan memberikan motivasi jika ade rekan-rekan yang tidak semangat agar semangat dengan mudah”.[[24]](#footnote-24)

Dari penjelasan bapak H bahwa mereka juga terkadang saling menilai dan juga terkadang memberikan motivasi pada temannya yang tidak semangat atau yang ada masalah agar bisa mengajar seperti biasannya, jadi jika sikap seperti ini terus diterapkan akan memberikan dampak positif pada pegawai dan lembaga.

1. Misi

Misi adalah rumusan langka-langka yang merupakan kunci untuk mulai melakukan inisiatif mewujudkan, mengevaluasi dan mempertajam bentuk-bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi( seseorang, masyarakat, bangsa atau perusahaan).[[25]](#footnote-25)

Setiap lembaga harus mempunyai misi atau tujuan yang jelas begitu pula dengan fraksi disini sebagaimana yang di nyatakan oleh kepala sekolah bahwa “Fraksi kita ini baru akan berkembang tapi jika tujuan kami disini sesuai dengan tujuan visi misi ini adalah Mewujudkan kader bangsa yang idealis, agamis dan berpegang tegu pada norma kenegaraan”.[[26]](#footnote-26)

Ketua fraksi menjelaskan bahwa tujuan fraksi adalah mewujudkan kader bangsa yang idealis, dan berpegang tegu pada norma kenegaraan, jadi dengan begitu proses yang akan di capai akan lebih terarah serta akan mempermudah personalia dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

1. Kebijakan

Dari observasi sipeneliti menemuksn bahwa kebijakan juga mempengaruhi personalia ada juga yang berdmpak positif dan negatif, dalam melaksanakan tugasnya jika kebijakan yang diberikan kepada personalia tidak nyaman maka akan kurangnya profesionalitas pegawai terhadap pekerjaannya, seperti kebijakan dalam mengambil keputusan pada setiap kebijakan yang telah ditetapkan kepada mereka, seperti penerimaan gaji, tempat yang nyaman, serta mendorong para pekerja untuk mewujudkan potensi mereka semaksimal mungkin.

Jadi kesimpulannya didalam perkembangan organisasi sebuah lembaga tidak lepas dari pengaruh internal dan eksternal. Secara umum kebijakan manajemen dalam menentukan arah lembaga juga akan sangat ditentukan oleh lingkungan lembaga yakni baik itu eksternal dan internal yang terpenting adalah bagaimana menghadapi dampak dari kedua faktor tersebut baik itu yang fositif maupun negatif sebagaimana fraksi ini sepakat bahwa mereka mengatakan “Tinggal kembali kepada kita sendiri bagaimana kita mengatasi kedua faktor tersebut baik eksternal maupun internal karena dampak dari keduanya ini pasti ada, jika dia berdampak fositif akan memberikan kemajuan pada fraksi ini namun jika dia berdampak negatif itulah yang kita takutkan dan kalau bisa kita hindari dengan cara waspada pada setiap perkembangan zaman yang nantinya berdampak pada kita sendiri”.[[27]](#footnote-27)

Dari penjelasan anggota DPRD Kab. OKI dari fraksi Partai Golongan Karya tadi dapat di tarik kesimpulan bahwa yang terpenting adalah mencega dampak negatif dari kedua faktor tersebut bisa jadi dengan cara waspada dalam artian mempersiapkan diri agar bisa menghadapi setiap perubahan karena jika dibiarkan akan memberikan dampak negatif yaitu menghambat proses manajemen personalia serta tujuan dari fraksi ini.

Sedangkan menurut bpk Sudrono Asnawi faktor yang dominan menjadi pendukung pola komunikasi politik adalah sebagai berikut :

“1. Penguasaan Bahasa

Kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan sarana dasar komunikasi. Baik komunikator maupun audience (penerima informasi) harus menguasai bahasa yang digunakan dalam suatu proses komunikasi agar pesan yang disampaikan bisa dimegerti dan mendapatkan respon sesuai yang diharapkan.

Jika komunikator dan audience tidak menguasai bahasa yang sama, maka proses komunikasi akan menjadi lebih panjang karena harus menggunakan media perantara yang bisa menghubungkan bahasa keduanya atau yang lebih dikenal sebagai *translator* (penerjemah)

2. Sarana Komunikasi ( Teknologi Komunikasi )

Sarana yang dimaksud di sini adalah suatu alat penunjang dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal. Kemajuan IPTEK telah menghadirkan berbagai macam sarana komunikasi sehingga proses komunikasi menjadi lebih mudah.

3. Kemampuan Berpikir

Kemampuan berpikir (kecerdasan) pelaku komunikasi baik komunikator maupun audience sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Jika intelektualitas si pemberi pesan lebih tinggi dari pada penerima pesan, maka si pemberi pesan harus berusaha menjelaskan. Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir yang baik agar proses komunikasi bisa menjadi lebih baik dan efektif serta mengena pada tujuan yang diharapkan.

4. Lingkungan yang Baik ( Sarana dan Prasarana )

Lingkungan yang baik juga menjadi salah satu factor penunjang dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan di suatu lingkungan yang tenang bisa lebih dipahami dengan baik dibandingkan dengan komunikasi yang dilakukan di tempat bising/berisik. Komunikasi di lingkungan kampus Perguruan Tinggi tentu saja berbeda dengan komunikasi yang dilakukan di pasar”.[[28]](#footnote-28)

Dari apa yang di jelaskan oleh bpk Sudrono Asnawi, S. Sos dapak disimpulkan bahwa ada 4 faktor pendudkung komunikasi politik yang ada di antaranya Penguasaan Bahasa, Sarana Komunikasi, Kemampuan Berpikir dan Lingkungan yang Baik.

Sudah jadi pasangannya jika ada faktor pendukung sudah pasti ada faktor penghambat seperti apa yang di jelaskan oleh bpk Mohd. Rasyid Oemar: “

1. Hambatan sosio-antro-psikologis

a. Hambatan sosiologis

Karena dalam kehidupan masyarakat itu terbagi atas berbagai gologan dan lapisan, menimbulkan perbedaan status social, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan sebagainya, semua itu menjadi hambatan dalam berkomunikasi dan inilah yang termaksud dalam hambatan sosiologis.

b. Hambatan antropologis

Manusia, meskipun satu sama lain sama dalam jenisnya sebagai makhluk *“homo sapiens”*, tetapi ditakdirkan berbeda dalam banyak hal. Dalam komunikasi misalnya, komunikator dalam melancarkan komunikasinya dia akan berhasil apabila dia mengenal siapa komunikan dalam arti ‘siapa’ disini adalah bukan soal nama, melainkan ras, bangsa, atau suku apa si komunikan tersebut. Dengan mengenal dirinya, akan mengenal pula kebudayaannya, gaya hidup dan norma kehidupannya, kebiasaan dan bahasanya. Perlu kita ketahui komunikasi berjalan lancar jika suatu pesan yang disampaikan komunikator diterima olehg komunikan secara tuntas, yaitu diterima dalam pengertian *received* atau secara inderawi, dan dalam pengertian accepted atau rohani. Teknologi komunikasi tanpa dukungan kebudayaan tidak akan berfungsi.

c. Hambatan Psikologis ( Sikap dan Prilaku )

Factor psikologis sering menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Hal ini umunnya disebabkan sikomunikator dalam melancarkan komunikasinya tidak terlebih dahulu mengkaji si komunikan. Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologi lainnya; juga jika komunikasi menaruh prasangka kepada komunikator.

2. Hambatan semantis

Kalau hambatan sosiologis-antropologis-psikologis terdapat pada pihak komunikan, maka hambatan semantis terdapat pada komunikator. Factor semantis menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Agar proses komunikasi itu berjalan denga baik seorang komunikator hareus benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini, sebab salah mengucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian atau salah tafsir, yang pada gilirannya bisa ,menimbulkan salah komunikasi. Jadi untuk menghilangkan hambatan semantis dalam komunikasi, seorang komunikator harus mengucapakan pertanyaan yang jelas dan tegas, memilih kata-kata yang tidak menimbulkan persepsi yang salah, dan disususn dalam kalimat-kalimat yang dapat dimengerti.

3. Hambatan mekanis

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contohnya: suara telepon yang kurang jelas, berita surat kabar yang sulit dicari sambungan kolomnya, gambar yang kurang jelas pada pesawat televise dan lain-lain. Hambatan pada beberapa media tidak mungkin diatasi oleh komunikator tapi biasanya memerlukan orang-orang yang ahli di bidang tersebut misalnya teknisi.

4. Hambatan Ekologis

Hambatan ekologis terjadi oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya adalah suara riuh (bising) orang-orang atau lalu lintas, suara hujan atau petir, suara pesawat terbang dan lain-lain. Untuk menghindari hambatan ini, komunkator harus mengusahakan tempat komunikasi yang bebas dari gangguan seperti yang telah disebutkan tadi.[[29]](#footnote-29)

Dari apa yang di sampaikan oleh bpk Sudrono asnawi di atas jelas sudah bahwa faktor penghambat yang terjadi di lapangan ada 4 faktor diantaranya hambatan sosio-antro-psikologis hambatan semantis hambatan mekanis dan hambatan ekologis.

Jelaslah bahwa Faktor pendukung yang dominan adalah Latar Belakang Pendidikan, teknologi, motivasi, misi, kebijakan, penguasaan bahasa, sarana Komunikasi ( Teknologi Komunikasi ), kemampuan berpikir dan lingkungan yang baik (Sarana dan Prasarana). Sedangkan hambatan yang dominan adalah hambatan sosio-antro-psikologis, hambatan sosiologis, hambatan antropologis. Hambatan psikologis (Sikap dan Prilaku), hambatan semantis, hambatan mekanis dan hambatan ekologis juga termasuk hambatan komunikasi politik tetapi tidak terlalu dominan atau masih bisa di tolerir.

1. Heru Budianto dan Faris Hamid, *Ilmu Komunikasi,* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 258 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sodrono, anggota DPRD Kab. OKI fraksi partai Golongan Karya, *Wawancara*, Kayu Agung 25 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-2)
3. Heru Budianto dan Faris Hamid, *Ilmu Komunikasi,* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 258 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nawawi, anggota DPRD fraksi partai Golkar Wawancara 26 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tjun Surjaman, Komunikasi Politik Komunikator,pesan,Mediam(Bandung, PT Remaja Rosdakarya,1989). Hlm.15 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nawawi anang, anggota DPRD fraksi partai Golkar, Wawancara, 27 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik di Indonesia*, (Sinar Baru: Bandung, 1983), hlm. [↑](#footnote-ref-7)
8. Varma, S.P.*Teori Politik Modern*,( PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995)  
    hlm. 258 [↑](#footnote-ref-8)
9. Anwar hus , *jiwa politik serta seluk beluknya,* (jakarta:Jaka Pustaka,2005), hlm. 59 [↑](#footnote-ref-9)
10. . Mohd. Rasyid Oemar , anggota DPRD Kab. OKI fraksi partai Golkar, *wawancara*, Kayu Agung, 28 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-10)
11. . Nawawi, *Wawancara,* anggota fraksi partai Golkar, kayu agung29 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-11)
12. . Sodrono Asnawi, Anggota DPRD Kab. OKI, *Wawancara* kayu agung 28 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-12)
13. . Mohd. Rasyid Oemar, Anggota DPRD Kab. OKI *Wawancara,* 30 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-13)
14. . Sudrono, anggota fraksi partai Golkar, *Wawancara, 30 Juni 2013* [↑](#footnote-ref-14)
15. . Agus Hasan, anggota DPRD fraksi partai Golkar *Wawancara*, 26 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-15)
16. IU, Informan, *Deep Intervie*, Anggota DPRD Kab. OKI Muara Baru 27 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Observasi lapangan*, Anggota DPRD Kab. OKI Kayu Agung 30 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-17)
18. . HW, *Focus Group Discussion,* Anggota DPRD Kab. OKI Muara Baru 28 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-18)
19. . JS, *Focus Group Discussion,* kayu agung, 28 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-19)
20. Hidayati nur, *AD-ISD-IBD*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2000).hal. 103 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen*, (Padang: CV alfabeta, 2004).hal.32 [↑](#footnote-ref-21)
22. . Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Diri*,(Bandung:PT. Remaja Rosdakaya, 2006). Hal. 82. [↑](#footnote-ref-22)
23. . Nyayu khodijah, *Psikologi Umum*, ( Palembang:P3RF, 2006).hlm.135 [↑](#footnote-ref-23)
24. . H, Informan, *Deep Intervie*, Kayu agung, 27 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-24)
25. Tilaar, *Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Era globalisasi*,( Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia, 1997).hal.13 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sudrono, Informan (anggota fraksi partai Golkar), *Deep Intervie*, kayu agung27 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-26)
27. Anggota Fraksi Partai Golongan Karya, *Focus Group Discussion,* kayu agung 28 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-27)
28. . Sudrono, anggota fraksi partai Golkar ,Deep Interview, akyu agung 29 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-28)
29. . Sudrono Asnawi, anggota fraksi partai Golkar, kayu agung *Wawancara ,* 30 Juni 2013 [↑](#footnote-ref-29)